



SALINAN

BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wakatobi dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penundaan pembayaran TPP diberlakukan kepada:
 - a. PNS yang tidak patuh terhadap kewajiban Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - b. PNS yang tidak patuh terhadap ketentuan pemanfaatan/penguasaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - c. PNS yang tidak patuh terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Rekomendasi Pengembalian berdasarkan hasil audit BPK dan/atau Inspektorat/APIP;
 - d. PNS yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan satu tahun terakhir; dan

- e. PNS yang tidak membayar retribusi sampah rumah tangga (khusus PNS yang berdomisili di wilayah wajib retribusi sampah).
- (2) PNS yang mengalami penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan apabila yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi kepatuhan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
 - (3) Inspektorat Daerah menyampaikan laporan secara berkala terkait tindaklanjut hasil temuan audit BPK dan/atau APIP kepada PD setiap bulannya.
 - (4) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang memberi dan menerima gratifikasi;
 - b. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, dan PNS/CPNS Guru yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional Guru dan serta Pengawas Sekolah;
 - c. PNS/CPNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan;
 - d. PNS yang terpilih dan terangkat menjadi Kepala Desa;
 - e. PNS yang mendapat penugasan khusus pada Instansi Pemerintah atau di Luar Instansi Pemerintah dari Instansi Induknya;
 - f. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - g. PNS yang melaksanakan tugas belajar di luar wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - h. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - i. PNS yang menjalani cuti besar; dan
 - j. PNS/CPNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kriteria Pemberian TPP ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja keluaran (*output*)/hasil

- (outcome) atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja dengan bobot 60% (enam puluh persen);
- b. capaian kinerja kehadiran dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Kriteria perhitungan skor capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja *output/outcome* atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persentase dari nilai capaian kinerja yang didukung dengan hasil penilaian mengacu pada format Lampiran IV huruf A, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. skor 100% apabila nilai capaian kinerja $\geq 95\%$;
 - b. skor 95% apabila nilai capaian kinerja 90-94%;
 - c. skor 90% apabila nilai capaian kinerja 85-89%;
 - d. skor 85% apabila nilai capaian kinerja 80-84%;
 - e. skor 80% apabila nilai capaian kinerja 75-79%;
 - d. skor 75% apabila nilai capaian kinerja 70-74%;
 - e. skor 70% apabila nilai capaian kinerja 65-69%;
 - f. skor 65% apabila nilai capaian kinerja 60-64%;
 - g. skor 60% apabila nilai capaian kinerja 55-59%;
 - h. skor 55% apabila nilai capaian kinerja 50-54%;
 - i. skor 50% apabila nilai capaian kinerja 45-49%;
 - j. skor 45% apabila nilai capaian kinerja 40-44%;
 - k. skor 40% apabila nilai capaian kinerja 35-39%;
 - l. skor 35% apabila nilai capaian kinerja 30-34%;
 - m. skor 30% apabila nilai capaian kinerja 25-29%;
 - n. skor 25% apabila nilai capaian kinerja 20-24%;
 - o. skor 20% apabila nilai capaian kinerja 15-19%;

- p. skor 15% apabila nilai capaian kinerja 10-14%;
 - q. skor 10% apabila nilai capaian kinerja 5-9%;
 - r. skor 5% apabila nilai capaian kinerja 1-4%;
 - dan
 - s. skor 0% apabila nilai capaian kinerja 0.
- (2a) Untuk mendukung penilaian kinerja aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan pengukuran aktivitas bulanan serta uraian aktivitas dan *output* bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf B dan huruf C.
- (3) Kriteria perhitungan skor nilai capaian kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan skor kehadiran dan ketidakhadiran, yang meliputi:
- a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya;
 - c. tidak melakukan presensi waktu istirahat dan masuk kerja kembali;
 - d. tidak mengikuti apel masuk kerja dan apel pulang kerja; dan
 - e. ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah.
- (4) Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. keterlambatan masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:
Skor 1 (0,50%) = $100 - (0,50\% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;
 - b. keterlambatan masuk kerja lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (Enam Puluh Satu) menit:
Skor 2 (1,00%) = $100 - (1,00\% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;
 - c. keterlambatan masuk kerja lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:
Skor 3 (1,25%) = $100 - (1,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;
 - d. keterlambatan masuk kerja ≥ 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi elektronik dan tidak mengisi daftar hadir hari kerja:
Skor 4 (1,50%) = $100 - (1,50\% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$.

- (5) Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. pulang kerja sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh) menit:
Skor 5 (0,50%) = $100 - (0,50\% \times \text{jumlah hari pulang cepat})$;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (Enam Puluh) menit:
Skor 6 (1,00%) = $100 - (1,00\% \times \text{jumlah hari pulang cepat})$;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh) menit:
Skor 7 (1,25%) = $100 - (1,25\% \times \text{jumlah hari pulang cepat})$;
 - d. pulang kerja sebelum waktunya ≥ 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi elektronik dan tidak mengisi daftar hadir hari kerja:
Skor 8 (1,50%) = $100 - (1,50\% \times \text{jumlah hari pulang cepat})$.
- (5a) Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. tidak melakukan presensi istirahat tepat waktu senin-kamis (paling cepat jam 12.00) dan hari jum'at (paling cepat jam 11.00):
Skor 9 (1,50%) = $100 - (1,50\% \times \text{jumlah tidak melakukan presensi istirahat})$;
 - b. tidak melakukan presensi masuk kembali senin-kamis (paling cepat 12.45 dan paling lambat jam 13.00) dan hari jum'at (paling cepat 13.00 dan paling lambat jam 13.30):
Skor 10 (1,50%) = $100 - (1,50\% \times \text{jumlah tidak melakukan presensi masuk kerja kembali})$.
- (6) Kriteria penghitungan skor ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. tidak hadir mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
Skor 11 (1,50%) = $100 - (1,50\% \times \text{jumlah hari tidak mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah})$;
 - b. tidak hadir mengikuti apel pulang kerja tanpa keterangan yang sah.

- Skor 12 (1,50%) = 100 - (1,50% x jumlah hari tidak mengikuti apel pagi pulang kerja tanpa keterangan yang sah);
- c. tidak hadir kerja untuk setiap 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah dirumuskan sebagai berikut:
Skor 13 (100%/jumlah hari kerja) = 100 - (100%/jumlah hari kerja x jumlah hari tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah);
- d. tidak hadir kerja selama 1 (satu) bulan hari kerja tanpa alasan yang sah tidak dibayarkan TPP (TPP Kehadiran dan TPP Aktivitas) untuk bulan berkenaan.
- (7) Total jumlah skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut:
skor prestasi kehadiran = 100 - {1.300 - (Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 10 + Skor 11 + Skor 12 + Skor 13)}.
- Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan Skor 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) nilainya adalah 1.200, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai waktu kerja PNS/CPNS dan waktu perekaman pada mesin absensi elektronik untuk PD yang menerapkan kerja shift atau penugasan waktu kerja khusus bagi sebagian pegawai disebabkan tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD dan disesuaikan dengan mesin absensi elektronik dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu.
- (1a) Ketentuan mengenai waktu perekaman pada mesin absensi elektronik untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juli masih menerapkan 2 kali absensi dan untuk absensi elektronik 4 kali absensi dilaksanakan pada bulan Agustus 2025.
- (1b) Dengan berlakunya absensi elektronik 4 kali, maka khusus pelaksanaan absensi elektronik finjer pulang pada hari Jum'at dilaksanakan paling cepat jam 17.00.

- (2) Ketentuan mengenai jam kerja PNS/CPNS pada saat bulan Ramadhan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jam kerja pada Bulan Ramadhan.
4. Ketentuan Lampiran, yakni Lampiran II untuk Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi menurut kelas jabatan dan Nomenklatur jabatan, Lampiran III untuk Besaran Penambahan Pemberian TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang ditambahkan karena Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bekerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya, Lampiran IV dan Lampiran V huruf A diubah, Lampiran VI dihapus dan Lampiran VII diubah menjadi Lampiran VI, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 28-7-2025

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 28-7-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ttd/cap

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 14



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

BASIC TPP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI MENURUT KELAS JABATAN

No.	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja BPK RI Per Kelas Jabatan (Rp)	IKFD	IKK	IPPD	Basic TPP Per Kelas Jabatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 = (3x4x5x6)
1	15	29.286.000	0,70	0,84	0,80	13.781.874
2	14	22.295.000	0,70	0,84	0,80	10.491.938
3	13	20.010.000	0,70	0,84	0,80	9.416.626
4	12	16.000.000	0,70	0,84	0,80	7.529.536
5	11	12.370.000	0,70	0,84	0,80	5.821.273
6	10	10.760.000	0,70	0,84	0,80	5.063.613
7	9	9.360.000	0,70	0,84	0,80	4.404.779
8	8	7.523.000	0,70	0,84	0,80	3.540.294
9	7	6.633.000	0,70	0,84	0,80	3.121.463
10	6	5.764.000	0,70	0,84	0,80	2.712.515
11	5	4.807.000	0,70	0,84	0,80	2.262.155
12	4	2.849.000	0,70	0,84	0,80	1.340.728
13	3	2.354.000	0,70	0,84	0,80	1.107.783
14	2	1.947.000	0,70	0,84	0,80	916.250
15	1	1.540.000	0,70	0,84	0,80	724.718

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagian Hukum Setda,
Haliana Anis, S.H.,MH.Kes
NIP. 1981015 199803 2 008



BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN WAKATOBI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
 MENURUT KELAS JABATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SEKRETARIAT DAERAH		
A	Jabatan Struktural		
1	Sekretaris Daerah	15	6.691.000
2	Asisten Sekda	14	5.094.000
3	Staf Ahli Bupati	13	4.572.000
4	Kepala Bagian	12	3.655.000
5	Kepala Sub Bagian Protokoler	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Penataan Daerah)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Bina Kehidupan Agama)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pelayanan Sosial)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Komunitas Adat)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	7	1.515.000
11	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Rencana Program dan Kegiatan)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Standar Harga)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengembangan Potensi Daerah)	7	1.515.000
15	Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa)	7	1.515.000
16	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Analisis Advokasi Hukum)	7	1.515.000
17	Penelaah Teknis Kebijakan (Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa)	7	1.515.000

18	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jabatan)	7	1.515.000
19	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Kinerja)	7	1.515.000
20	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Humas)	7	1.515.000
21	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi)	7	1.515.000
22	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
23	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan Keuangan)	7	1.515.000
24	Analisis Aset Daerah	7	1.515.000
25	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Naskah Rapat Pimpinan)	7	1.515.000
26	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Administrasi Pemerintahan)	6	1.317.000
27	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Data)	6	1.317.000
28	Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Wisma)	6	1.317.000
29	Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas)	6	1.317.000
30	Pengolah Data dan Informasi (Notulis Rapat)	6	1.317.000
31	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum/Bendahara Pengeluaran)	5	1.098.000
32	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Bupati)	5	1.098.000
33	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum/Bendahara Barang)	5	1.098.000
34	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum/Bendahara Penerimaan)	5	1.098.000
35	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum)	5	1.098.000
36	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Keuangan)	5	1.098.000
37	Operator Layanan Operasional (Pengemudi VIP)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
38	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2.458.000
39	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi Teknis)	10	2.458.000
40	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
41	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	2.458.000
42	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2.458.000
43	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	2.458.000
44	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	2.138.000
45	Analisis Hukum Ahli Muda	9	2.138.000
46	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	1.718.000
47	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1.718.000

2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
A	Jabatan Struktural		
1	Sekretaris DPRD	14	5.094.000
2	Kepala Bagian	12	3.655.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tata Usaha)	7	1.515.000
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Risalah)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Naskah Rapat Pimpinan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Kesekretariatan Pimpinan Fraksi)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Administrasi Pegawai Legislatif)	7	1.515.000
11	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Rencana Program dan Kegiatan)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Humas)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Laporan Realisasi Anggaran)	7	1.515.000
15	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum)	5	1.098.000
16	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Kepegawaian/Bendahara Pengeluaran)	5	1.098.000
17	Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor)	5	1.098.000
18	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	5	1.098.000
19	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Persuratan)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
20	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
21	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	2.458.000
22	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	2.138.000
23	Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	2.138.000
24	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.138.000
3	INSPEKTORAT DAERAH		
A	Jabatan Struktural		
1	Inspektur Daerah	14	5.094.000
2	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	3.655.000
3	Inspektur Pembantu	11	2.826.000
4	Inspektur Pembantu	11	2.826.000
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	2.138.000

B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1.515.000
8	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)	5	1.098.000
9	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
10	JF Auditor Madya	12	3.655.000
11	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	12	3.655.000
12	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
13	JF Auditor Ahli Muda	10	2.458.000
14	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	10	2.458.000
15	JF Auditor Ahli Pertama	8	1.718.000
16	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	1.718.000
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Seksi	9	2.138.000
6	Kepala Seksi	8	1.718.000
7	Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	8	1.718.000
8	Koordinator Pendidikan Kecamatan	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Sertifikasi Pendidik)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Perancang Sistem Informasi Kepegawaian)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan Keuangan)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Data Peserta Didik)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan)	7	1.515.000
15	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	7	1.515.000
16	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya)	7	1.515.000
17	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya)	7	1.515.000
18	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan)	7	1.515.000
19	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)	6	1.317.000

20	Pengelola Layanan Operasional (Teknisi Jaringan Teknologi Informasi Komputer Pendidikan)	6	1.317.000
21	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)	5	1.098.000
22	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)	5	1.098.000
23	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
24	Pamong Belajar Ahli Madya	11	2.826.000
25	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
26	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9	2.138.000
27	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	2.458.000
28	Pamong Budaya Ahli Muda	9	2.138.000
29	Kepala SKB (Pamong Belajar Ahli Muda)	9	2.138.000
30	Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	2.826.000
5	DINAS KESEHATAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Direktur BLUD UPTD Puskesmas	9	2.138.000
6	Kepala UPTD Puskesmas	9	2.138.000
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jabatan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Rencana Program dan Kegiatan)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Penyakit Menular)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Narkoba)	7	1.515.000
15	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Gizi)	7	1.515.000
16	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Obat dan Makanan)	7	1.515.000
17	Penata Kelola Layanan Kesehatan (Pemeriksa Sanitasi)	7	1.515.000
18	Pengelola Layanan Kesehatan (Pengelola Program Imunisasi)	6	1.317.000
19	Pengelola Layanan Kesehatan (Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung)	6	1.317.000

20	Pengelola Layanan Kesehatan (Pengelola Program Kesehatan Keluarga)	6	1.317.000
21	Pengelola Layanan Kesehatan (Pengelola Kefarmasian)	6	1.317.000
22	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)	6	1.317.000
23	Pengadministrasi Umum	5	1.098.000
24	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian)	5	1.098.000
25	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan)	5	1.098.000
26	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Gudang Farmasi)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
27	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
28	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	2.458.000
29	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	2.138.000
30	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	2.138.000
31	Nutrisi Ahli Muda	9	2.138.000
32	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	9	2.138.000
33	Sanitarian Ahli Muda	9	2.138.000
34	Apoteker Ahli Muda	9	2.138.000
35	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.718.000
36	JF Administrator Kesehatan Muda	9	2.138.000
37	JF Administrator Kesehatan Madya	11	2.826.000
38	JF Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	1.317.000
39	JF Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
40	JF Analisis Kepegawaian Penyelia	8	1.718.000
41	JF Analisis Kepegawaian Pertama/Analisis SDM Aparatur Pertama	8	1.718.000
42	JF Apoteker Pertama	8	1.718.000
43	JF Apoteker Muda	9	2.138.000
44	JF Apoteker Madya	11	2.826.000
45	JF Apoteker Utama	13	4.580.000
46	JF Arsiparis Pelaksana	6	1.317.000
47	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
48	JF Arsiparis Penyelia	8	1.718.000
49	JF Arsiparis Pertama	8	1.718.000
50	JF Asisten Apoteker Terampil	6	1.317.000
51	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.317.000
52	JF Asisten Apoteker Mahir	7	1.515.000
53	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
54	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.718.000
55	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1.098.000
56	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	1.317.000
57	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000

58	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	1.718.000
59	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1.718.000
60	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	2.138.000
61	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	2.826.000
62	JF Nutrisionis Terampil	6	1.317.000
63	JF Nutrisionis Pelaksana	6	1.317.000
64	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
65	JF Nutrisionis Penyelia	8	1.718.000
66	JF Nutrisionis Pertama	8	1.718.000
67	JF Nutrisionis Muda	9	2.138.000
68	JF Nutrisionis Madya	11	2.826.000
69	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8	1.718.000
70	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	9	2.138.000
71	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	11	2.826.000
72	JF Sanitarian Pelaksana	6	1.317.000
73	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
74	JF Sanitarian Penyelia	8	1.718.000
75	JF Sanitarian Pertama	8	1.718.000
76	JF Sanitarian Muda	9	2.138.000
77	JF Sanitarian Madya	11	2.826.000
78	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.317.000
79	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
80	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.718.000
81	JF Apoteker Mahir	7	1.515.000
82	JF Fisioterapis Terampil	6	1.317.000
83	JF Fisioterapis Pelaksana	6	1.317.000
84	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
85	JF Fisioterapis Penyelia	8	1.718.000
86	JF Bidan Terampil	6	1.317.000
87	JF Bidan Pelaksana	6	1.317.000
88	JF Bidan Mahir	7	1.515.000
89	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
90	JF Bidan Penyelia	8	1.718.000
91	JF Bidan Pertama	8	1.718.000
92	JF Bidan Muda	9	2.138.000
93	JF Bidan Madya	11	2.826.000
94	JF Dokter Pertama	9	2.138.000
95	JF Dokter Muda	10	2.458.000
96	JF Dokter Madya	12	3.655.000
97	JF Dokter Utama	14	5.094.000
98	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.138.000
99	JF Dokter Gigi Muda	10	2.458.000
100	JF Dokter Gigi Madya	12	3.655.000
101	JF Dokter Gigi Utama	14	5.094.000
102	JF Perawat Terampil	6	1.317.000
103	JF Perawat Pelaksana	6	1.317.000
104	JF Perawat Mahir	7	1.515.000
105	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
106	JF Perawat Penyelia	8	1.718.000
107	JF Perawat Pertama	8	1.718.000

108	JF Perawat Muda	9	2.138.000
109	JF Perawat Madya	11	2.826.000
110	JF Perawat Gigi Terampil	6	1.317.000
111	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.317.000
112	JF Perawat Gigi Mahir	7	1.515.000
113	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
114	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1.718.000
115	JF Perawat Gigi Pertama	8	1.718.000
116	JF Perawat Gigi Muda	9	2.138.000
117	JF Perawat Gigi Madya	11	2.826.000
118	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	1.317.000
119	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	1.515.000
120	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.718.000
121	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.718.000
122	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	2.138.000
123	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	2.826.000
124	JF Perekam Medis Terampil	6	1.317.000
125	JF Perekam Medis Pelaksana	6	1.317.000
126	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	8	1.718.000
127	JF Perekam Medis Penyelia	8	1.718.000
128	JF Analis Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
A	Jabatan Struktural		
1	Direktur	12	3.655.000
2	Kepala Bagian Tata Usaha	11	2.826.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Seksi	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kesehatan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan keuangan)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Gizi)	7	1.515.000
12	Penata Kelola Layanan Kesehatan (Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	7	1.515.000
13	Penata Kelola Layanan Kesehatan (Penata Rontgen)	7	1.515.000
14	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/ Bendahara Barang)	6	1.317.000
15	Pengelola Pelayanan Kesehatan/Pengelola Layanan Kesehatan	6	1.317.000
16	Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Instalasi)	6	1.317.000
17	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
15	JF Dokter Pertama	9	2.138.000
16	JF Dokter Muda	10	2.458.000
17	JF Dokter Madya	12	3.655.000

18	JF Dokter Utama	14	5.094.000
19	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.138.000
20	JF Dokter Gigi Muda	10	2.458.000
21	JF Dokter Gigi Madya	12	3.655.000
22	JF Dokter Gigi Utama	14	5.094.000
23	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	1.098.000
24	JF Sanitarian Pelaksana	6	1.317.000
25	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
26	JF Sanitarian Penyelia	8	1.718.000
27	JF Sanitarian Penyelia (Bendahara Penerimaan)	8	1.718.000
28	JF Sanitarian Pertama	8	1.718.000
29	JF Sanitarian Muda	9	2.138.000
30	JF Sanitarian Madya	11	2.826.000
31	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	1.317.000
32	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
33	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	1.718.000
34	JF Radiografer Pelaksana	6	1.317.000
35	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
36	JF Radiografer Medis Penyelia	8	1.718.000
37	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.718.000
38	JF Administrator Kesehatan Muda	9	2.138.000
39	JF Administrator Kesehatan Madya	11	2.826.000
40	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	1.098.000
41	JF Asisten Apoteker Terampil	6	1.317.000
42	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.317.000
43	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
44	JF Asisten Apoteker Mahir	7	1.515.000
45	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.718.000
46	JF Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	1.718.000
47	JF Apoteker Pertama	8	1.718.000
48	JF Apoteker Muda	9	2.138.000
49	JF Apoteker Madya	11	2.826.000
50	JF Apoteker Utama	13	4.580.000
51	JF Nutrisionis Pelaksana	6	1.317.000
52	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
53	JF Nutrisionis Penyelia	8	1.718.000
54	JF Nutrisionis Pertama	8	1.718.000
55	JF Nutrisionis Muda	9	2.138.000
56	JF Nutrisionis Madya	11	2.826.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1.098.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.317.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	1.317.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	1.515.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.718.000
63	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.718.000
64	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	2.138.000

65	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	2.826.000
66	JF Perekam Medis Pelaksana	6	1.317.000
67	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
68	JF Perekam Medis Penyelia	8	1.718.000
69	JF Okupasi Terapi Pelaksana	6	1.317.000
70	JF Okupasi Terapi Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
71	JF Okupasi Terapi Mahir	7	1.515.000
72	JF Okupasi Terapi Penyelia	8	1.718.000
73	JF Fisioterapis Terampil	6	1.317.000
74	JF Fisioterapis Pelaksana	6	1.317.000
75	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
76	JF Fisioterapis Penyelia	8	1.718.000
77	JF Fisioterapis Pertama	8	1.718.000
78	JF Fisioterapis Muda	9	2.138.000
79	JF Fisioterapis Madya	11	2.826.000
80	JF Refraksionis Optisien Terampil	6	1.317.000
81	JF Refraksionis Optisien Pelaksana	6	1.317.000
82	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
83	JF Refraksionis Optisien Penyelia	8	1.718.000
84	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	1.317.000
85	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
86	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1.718.000
87	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8	1.718.000
88	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	9	2.138.000
89	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	11	2.826.000
90	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	1.098.000
91	JF Perawat Pelaksana	6	1.317.000
92	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
93	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
94	JF Perawat Terampil	6	1.317.000
95	JF Perawat Mahir	7	1.515.000
96	JF Perawat Penyelia	8	1.718.000
97	JF Perawat Pertama	8	1.718.000
98	JF Perawat Muda	9	2.138.000
99	JF Perawat Madya	11	2.826.000
100	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	1.098.000
101	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.317.000
102	JF Perawat Gigi Terampil	6	1.317.000
103	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
104	JF Perawat Gigi Mahir	7	1.515.000
105	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1.718.000
106	JF Perawat Gigi Ahli Pertama	8	1.718.000
107	JF Perawat Gigi Ahli Madya	11	2.826.000
108	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	1.098.000
109	JF Bidan Terampil	6	1.317.000
110	JF Bidan Pelaksana	6	1.317.000
111	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
112	JF Bidan Mahir	7	1.515.000
113	JF Bidan Penyelia	8	1.718.000
114	JF Bidan Pertama	8	1.718.000
115	JF Bidan Muda	9	2.138.000
116	JF Bidan Madya	11	2.826.000

7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Seksi	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Infrastruktur)	7	1.515.000
8	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tata Ruang)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Perancang Sistem Informasi Kepegawaian)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Jalan dan Jembatan)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Pemeriksa Jalan dan Jembatan)	7	1.515.000
15	Penata Layanan Operasional (Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman)	7	1.515.000
16	Penata Layanan Operasional (Pengawas Bangunan dan Gedung)	7	1.515.000
17	Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik)	7	1.515.000
18	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Tata Ruang)	7	1.515.000
19	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Tata Ruang)	7	1.515.000
20	Penata Layanan Operasional (Bendahara)	7	1.515.000
21	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Gaji)	6	1.317.000
22	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang (Pengelola Tata Ruang)	6	1.317.000
23	Operator Layanan Operasional (Pemelihara Bangunan)	5	1.098.000
24	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan)	5	1.098.000
25	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)	5	1.098.000
26	Petugas Operasi dan Pemeliharaan (Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
27	Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	2.138.000
28	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	2.138.000
29	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	2.138.000

30	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	2.138.000
31	Penata Ruang Ahli Muda	9	2.138.000
32	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	2.138.000
33	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	1.718.000
34	Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	1.718.000
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.515.000
7	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	1.515.000
8	Penata Layanan Operasional (Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan)	7	1.515.000
9	Analisis Penataan Kawasan	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan)	7	1.515.000
11	Pengawas Fisik Permukiman	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
13	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Barang Milik Negara)	6	1.317.000
14	Pengelola Kepegawaian	6	1.317.000
15	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	1.317.000
16	Pengadministrasian Keuangan	5	1.098.000
17	Pengadministrasian Umum	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
18	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	2.138.000
19	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	1.718.000
20	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	9	2.138.000
21	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	1.718.000
9	DINAS SOSIAL		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tata Usaha)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pelayanan Sosial)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial)	7	1.515.000
9	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Anak Terlantar)	5	1.098.000

C	Jabatan Fungsional		
10	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
11	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	2.138.000
12	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	2.138.000
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Satuan	14	5.094.000
2	Sekretaris	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
6	Kepala Seksi	9	2.138.000
7	Kepala Seksi	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
9	Penata Layanan Operasional (Pengasuh Praja)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Satuan Pengawas Internal)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembina Jasmani dan Mental)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengembangan Kompetensi)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Perlindungan Masyarakat)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Kebakaran)	7	1.515.000
15	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian)	5	1.098.000
16	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan)	5	1.098.000
17	Operator Layanan Operasional (Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
18	Polisi Pamong Praja Mahir	7	1.515.000
19	Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	6	1.317.000
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Badan	14	5.094.000
2	Sekretaris Badan	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pendayagunaan Lembaga Keagamaan)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Ideologi)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Wawasan Kebangsaan)	7	1.515.000
8	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)	5	1.098.000
9	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian)	5	1.098.000

C	Jabatan Fungsional		
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2.458.000
11	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Pelaksana Badan	14	5.094.000
2	Sekretaris Badan	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tata Usaha)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Bencana)	7	1.515.000
C	Jabatan Fungsional		
7	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2.458.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala UPTD	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)	7	1.515.000
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Analisis Perlindungan Perempuan)	7	1.515.000
C	Jabatan Fungsional		
9	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	2.138.000
11	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	2.138.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara/Bendahara Pengeluaran)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis tata Usaha)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Desa dan Kelurahan)	7	1.515.000
C	Jabatan Fungsional		
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	2.138.000
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Pengurus Barang Pengguna)	9	2.138.000

15	DINAS KETAHANAN PANGAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Manajemen Perkantoran)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pangan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Harga Pangan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Pangan)	7	1.515.000
C	Jabatan Fungsional		
11	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
12	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10	2.458.000
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
6	Kepala UPTD	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengembangan SDM Aparatur)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengamanan Lingkungan)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Dampak Lingkungan)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat)	7	1.515.000
12	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Analisis Hukum)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Lingkungan Hidup)	7	1.515.000
14	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Kepegawaian)	5	1.098.000
15	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
16	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	2.138.000
17	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	2.138.000
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000

4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analisis Data dan Informasi, Administrator Data Base Kependudukan)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Statistik, Analisis Kerjasama, Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelola Data Statistik)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Kerja Sama)	7	1.515.000
9	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Sistem dan Jaringan)	6	1.317.000
10	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	6	1.317.000
11	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Data Statistik)	6	1.317.000
12	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
13	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2.458.000
15	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9	2.138.000
16	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	2.138.000
17	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	8	1.718.000
18	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	7	1.515.000
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
5	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana/Bendahara Barang)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana)	7	1.515.000
10	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Kepegawaian)	6	1.317.000
11	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi)	6	1.317.000

C	Jabatan Fungsional		
12	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
13	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	2.138.000
19	DINAS PERHUBUNGAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
6	Kepala Seksi	9	2.138.000
7	Kepala Seksi	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Keuangan)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pelabuhan)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pelayaran)	7	1.515.000
14	Pengelola Layanan Operasional (Pengawas Fasilitas dan Perawatan Peralatan Pelabuhan)	6	1.317.000
15	Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Usaha Angkutan)	6	1.317.000
16	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Keuangan)	5	1.098.000
17	Operator Layanan Operasional (Juru Pungut Retribusi)	3	538.000
C	Jabatan Fungsional		
18	Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Muda	9	2.138.000
19	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda	9	2.138.000
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Keuangan)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Berita)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Redaktur)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Pengembangan Sarana IPTEK)	7	1.515.000
10	Penata Layanan Operasional (Pengendali Teknologi Informasi)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Statistik)	7	1.515.000

12	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analisis Data dan Informasi)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Persandian)	7	1.515.000
15	Pengelola Layanan Operasional (Pranata Alat Persandian)	6	1.317.000
16	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Kepegawaian)	6	1.317.000
C	Jabatan Fungsional		
17	Pranata Humas Ahli Muda	9	2.138.000
18	Pranata Komputer Ahli Muda	9	2.138.000
19	Statistisi Ahli Muda	9	2.138.000
20	Sandiman Ahli Muda	9	2.138.000
21	Pranata Komputer Terampil	6	1.317.000
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
6	Kepala UPTD	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Koperasi)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Bimbingan Usaha)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Bahan Persyaratan Kerja)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Bahan Pengupahan)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Bahan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jabatan)	7	1.515.000
C	Jabatan Fungsional		
15	Pengawas Koperasi Ahli Muda	10	2.458.000
16	Pengantar Kerja Ahli Muda	9	2.138.000
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	10	2.458.000
18	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	2.138.000
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000

B	Jabatan Pelaksana		
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Rencana Program dan Kegiatan)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Penanaman Modal)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengembangan Potensi Daerah)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Kerjasama dan Permodalan)	7	1.515.000
9	Pengawas Penanaman Modal	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Laporan Hasil Pengawasan)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pelayanan)	7	1.515.000
12	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
13	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
14	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	2.138.000
15	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	9	2.138.000
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Kepemudaan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Olah Raga)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Keolahragaan)	7	1.515.000
10	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Keuangan)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
11	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
12	Pelatih Olah Raga Ahli Muda	9	2.138.000
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tata Usaha)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pelayanan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Perpustakaan)	7	1.515.000

9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Perpustakaan)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Kearsipan)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Laporan Hasil Pengawasan)	7	1.515.000
13	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Bahan Pustaka)	6	1.317.000
14	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Perpustakaan)	6	1.317.000
15	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Keuangan)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
16	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
17	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.138.000
18	JF Pustakawan Terampil	6	1.317.000
19	JF Pustakawan Mahir	7	1.515.000
20	JF Pustakawan Pelaksana	6	1.317.000
21	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
22	JF Pustakawan Penyelia	8	1.718.000
23	JF Pustakawan Pertama	8	1.718.000
24	JF Pustakawan Ahli Muda	9	2.138.000
25	JF Pustakawan Ahli Madya	11	2.826.000
26	JF Arsiparis Terampil	6	1.317.000
27	JF Arsiparis Mahir	7	1.515.000
28	JF Arsiparis Penyelia	8	1.718.000
29	JF Arsiparis Pertama	8	1.718.000
30	JF Arsiparis Ahli Muda	9	2.138.000
31	JF Arsiparis Ahli Madya	11	2.826.000
25	DINAS PERIKANAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
5	Kepala UPTD Perikanan	9	2.138.000
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perikanan	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Rencana Program dan Kegiatan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan)	7	1.515.000
9	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Analisis Mutu Hasil Perikanan)	7	1.515.000
10	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Analisis Kenelayanan)	7	1.515.000
11	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analisis Data dan Informasi)	7	1.515.000

12	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Analisis Perikanan Budidaya)	7	1.515.000
13	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan)	7	1.515.000
14	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Keuangan)	5	1.098.000
15	Operator Layanan Operasional (Teknisi Mesin)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
16	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
17	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.138.000
18	Analisis Akuakultur Ahli Muda	9	2.138.000
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	9	2.138.000
20	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	9	2.138.000
21	Pengawas Perikanan Ahli Muda	9	2.138.000
22	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	10	2.458.000
23	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	9	2.138.000
24	Pengawas Perikanan Ahli Pertama/ Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	8	1.718.000
25	Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	1.515.000
26	DINAS PERTANIAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Kapasitas Penyuluh)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Program Penyuluhan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusunan Rencana Bahan Teknis Perbenihan)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas)	7	1.515.000
13	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Perencanaan dan Program)	5	1.098.000
14	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Umum)	5	1.098.000

C	Jabatan Fungsional		
15	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
16	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	9	2.138.000
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	2.138.000
18	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	2.138.000
19	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	2.138.000
20	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	9	2.138.000
21	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9	2.138.000
22	Medik Veteriner Ahli Muda	9	2.138.000
23	Penyuluh Pertanian Madya	11	2.826.000
24	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.718.000
25	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama (Bendahara Pengeluaran)	8	1.718.000
26	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	1.718.000
27	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	1.098.000
27	DINAS PARIWISATA		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
B	Jabatan Pelaksana		
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tata Usaha)	7	1.515.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pariwisata)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Penataan Kawasan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Kepariwisata)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Pengembangan Usaha)	7	1.515.000
10	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Objek Wisata/	6	1.317.000
11	Pengadministrasian Perkantoran Pengadministrasian Keuangan/	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
12	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
13	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.138.000
14	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	10	2.458.000
15	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2.458.000
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Dinas	14	5.094.000
2	Sekretaris Dinas	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala UPTD Pengelola Pasar	9	2.138.000

B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jabatan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengembangan Kompetensi Industri)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengawasan Mutu Produk)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Promosi dan Kerjasama)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Dunia Usaha)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur)	7	1.515.000
15	Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Sarana Perindustrian)	6	1.317.000
16	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Persuratan)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2.458.000
18	Penyuluh Perindustrian Ahli Muda	9	2.138.000
19	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	9	2.138.000
20	Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda	9	2.138.000
21	Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	2.458.000
22	Pemeriksa Perdagangan Berjangka komoditi Ahli Muda	10	2.458.000
23	Penera Ahli Muda	9	2.138.000
24	Pengamat Tera Penyelia	8	1.718.000
25	Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	9	2.138.000
26	JF Pengawas Perdagangan Ahli Muda	10	2.458.000
27	JF Penera Terampil	6	1.317.000
29	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Badan	14	5.094.000
2	Sekretaris Badan	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Rencana Program dan Kegiatan)	7	1.515.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Perencanaan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Data Sumber Daya Alam)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengembangan Infrastruktur)	7	1.515.000

11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Infrastruktur)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Penelitian dan Pengembangan)	7	1.515.000
13	Penata Layanan Operasional (Pengendali Teknologi Informasi)	7	1.515.000
14	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Kepegawaian)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
15	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
16	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9	2.138.000
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Badan	14	5.094.000
2	Sekretaris Badan	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.138.000
6	Kepala Sub Bidang	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pembiayaan Daerah)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Transaksi Keuangan)	7	1.515.000
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Perbendaharaan)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Laporan Keuangan)	7	1.515.000
12	Pengadministrasian Perkantoran (Pengadministrasian Anggaran)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
13	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.138.000
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Badan	14	5.094.000
2	Sekretaris Badan	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
6	Kepala Sub Bidang	9	2.138.000
7	Kepala Sub Bidang	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jabatan)	7	1.515.000
10	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analisis Data dan Informasi)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Diklat)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusunan Rencana Promosi)	7	1.515.000

13	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	6	1.317.000
14	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Kepegawaian)	6	1.317.000
15	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan)	5	1.098.000
16	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
17	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2.458.000
18	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
19	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9	2.138.000
20	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	9	2.138.000
21	Analisis Kepegawaian Muda	9	2.138.000
22	Pranata Komputer Pertama	8	1.718.000
23	Pranata Komputer Ahli Muda	9	2.138.000
24	Analisis Kepegawaian Madya	12	3.655.000
25	Analisis Kepegawaian Muda	10	2.458.000
26	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	3.655.000
27	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	2.458.000
28	Analisis Perencana Pegawai	9	2.138.000
29	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	1.718.000
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
A	Jabatan Struktural		
1	Kepala Badan	14	5.094.000
2	Sekretaris Badan	12	3.655.000
3	Kepala Bidang	11	2.826.000
4	Kepala Sub Bidang	9	2.138.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.138.000
6	Kepala Sub Bidang	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Keuangan)	7	1.515.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jabatan)	7	1.515.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pajak Daerah)	7	1.515.000
10	Penata Kelola sistem dan teknologi informasi (Analisis Data dan Informasi)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Penagihan Pajak)	7	1.515.000
12	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan)	5	1.098.000
13	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Persuratan)	5	1.098.000
14	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)	5	1.098.000
C	Jabatan Fungsional		
15	Perencana Ahli Muda	10	2.458.000
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2.138.000

33	KECAMATAN		
A	Jabatan Struktural		
1	Camat	13	4.572.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.826.000
3	Kepala Sub Bagian	8	1.718.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.138.000
5	Kepala Seksi	8	1.718.000
6	Kepala Seksi	9	2.138.000
7	Lurah	9	2.138.000
8	Sekretaris Kelurahan	8	1.718.000
9	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.718.000
B	Jabatan Pelaksana		
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	1.515.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat)	7	1.515.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan)	7	1.515.000
13	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Layanan Umum)	7	1.515.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pembangunan)	7	1.515.000
15	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pertanahan)	7	1.515.000
16	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tata Usaha)	7	1.515.000
17	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jabatan)	7	1.515.000
18	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Perlindungan Masyarakat)	7	1.515.000
19	Pengolah Data dan Informasi (Notulis Rapat)	6	1.317.000
20	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Dokumen Perizinan)	6	1.317.000
21	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Data)	6	1.317.000
22	Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Surat)	6	1.317.000
23	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)	5	1.098.000
24	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian)	5	1.098.000
25	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Pemerintahan)	5	1.098.000
26	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Pertanahan)	5	1.098.000
27	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Batas Wilayah)	5	1.098.000
28	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Pengaduan Publik)	5	1.098.000
29	Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan)	5	1.098.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Bagian Hukum Setda,
 Haliana Anis, S.H.,MH.Kes
 31015 199803 2 008



BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	Kelangkaan Profesi	13.297.000
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	Beban Kerja	5.097.000
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	Beban Kerja	5.097.000
4	Asisten Administrasi Umum	14	Beban Kerja	5.097.000
5	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	13	Beban Kerja	3.195.000
6	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	13	Beban Kerja	3.195.000
7	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13	Beban Kerja	3.195.000
8	Kepala Bagian Pemerintahan (PPTK)	12	Beban Kerja	2.680.000
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (PPTK)	12	Beban Kerja	2.680.000
10	Kepala Bagian Hukum (PPTK)	12	Beban Kerja	2.680.000
11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (PPK 2)	12	Beban Kerja	3.056.000
12	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PPK 1)	12	Beban Kerja	2.855.000

13	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PPK 1)	12	Beban Kerja	2.855.000
14	Kepala Bagian Organisasi (PPTK)	12	Beban Kerja	2.680.000
15	Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (PPTK)	12	Beban Kerja	2.680.000
16	Kepala Bagian Umum (PPTK)	12	Beban Kerja	2.680.000
17	Kepala Sub Bagian Protokoler	9	Beban Kerja	1.172.000
18	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Bagian Hukum)	7	Beban Kerja	830.000
19	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengelola Evanjab, Anjab, ABK dan Pelayanan Publik)	7	Beban Kerja	1.038.000
20	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Beban Kerja	511.000
21	Penelaah Teknis Kebijakan (Ketua LPSE)	7	Kondisi Kerja	1.038.000
22	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Tim LPSE)	7	Kondisi Kerja	511.000
23	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengelola Data TPP)	7	Beban Kerja	511.000
24	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
25	Pengolah Data dan Informasi (Pejabat Penatausahaan Barang)	6	Kondisi Kerja	511.000
26	Pengadministrasi Perkantoran (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	511.000
27	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	1.150.000
28	Pengadministrasi Perkantoran (Pembantu Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	511.000

29	Analisis Hukum Ahli Muda	9	Beban Kerja	1.172.000
30	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.213.000
31	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	Beban Kerja	1.107.000
32	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.213.000
33	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.415.000
34	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.415.000
35	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	Beban Kerja	1.172.000
36	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.213.000
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
1	Sekretaris DPRD	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
3	Pengadministrasian Perkantoran (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	5	Kondisi Kerja	511.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	952.000
5	Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	820.000
3	INSPEKTORAT DAERAH			
1	Inspektur Daerah	14	Beban Kerja	8.029.000
2	Inspektur Wilayah I Pembantu	11	Beban Kerja	2.246.000
3	Inspektur Wilayah II Pembantu	11	Beban Kerja	2.246.000
4	Inspektur Wilayah III Pembantu	11	Beban Kerja	2.246.000
5	Inspektur Wilayah IV Pembantu	11	Beban Kerja	2.246.000

6	Inspektur Pembantu Investigasi	11	Beban Kerja	2.246.000
7	Sekretaris Inspektorat (PPTK)	12	Beban Kerja	3.407.000
8	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	Beban Kerja	1.407.000
9	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	952.000
10	Pengadministrasi Perkantoran	5	Beban Kerja	391.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Pengeluaran)	7	Beban Kerja	540.000
12	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Beban Kerja	540.000
13	JF Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	1.684.000
14	JF Auditor Ahli Madya	12	Beban Kerja	1.803.000
15	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	Beban Kerja	1.413.000
16	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	Beban Kerja	1.803.000
17	JF Auditor Ahli Pertama	8	Beban Kerja	1.413.000
18	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.684.000
19	JF Auditor Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.684.000
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	820.000

4	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana (Tim Teknis/Direksi Teknis)	9	Beban Kerja	400.000
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	511.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	1.150.000
8	JF Perencana Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi Teknis)	10	Kondisi Kerja	1.220.000
5	DINAS KESEHATAN			
1	Kepala Dinas Kesehatan	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
5	Direktur BLUD UPTD Puskesmas (KPA BLUD)	9	Beban Kerja	500.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	1.150.000
7	JF Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
8	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	8	Kondisi Kerja	511.000
9	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama (Pengelola TPP Dinkes)	8	Beban Kerja	511.000
10	JF Apoteker Ahli Muda (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi)	9	Kondisi Kerja	450.000
11	JF Apoteker Ahli Madya (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi)	11	Kondisi Kerja	450.000

12	JF Bidan Mahir (Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi))	7	Kondisi Kerja	450.000
13	JF Asisten Apoteker Mahir (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan)	7	Kondisi Kerja	450.000
14	JF Perawat Penyelia (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan)	8	Kondisi Kerja	450.000
15	JF Perawat Ahli Muda (Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan)	9	Kondisi Kerja	450.000
16	JF Apoteker Ahli Pertama (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Kaledupa)	8	Kondisi Kerja	450.000
17	JF Apoteker Ahli Muda (Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Kaledupa)	9	Kondisi Kerja	450.000
18	JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Kaledupa)	9	Kondisi Kerja	450.000
19	JF Apoteker Ahli Muda (Pengurus Barang Pembantu)	9	Kondisi Kerja	450.000
20	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda (Puskesmas Runduma)	9	Tempat Bertugas	451.000
21	JF Perawat Terampil (Puskesmas Runduma)	6	Tempat Bertugas	451.000
22	JF Perawat Mahir (Puskesmas Runduma)	7	Tempat Bertugas	451.000
23	Sanitarian Terampil (Puskesmas Runduma)	6	Tempat Bertugas	451.000

24	JF Rekam Medik Terampil (Pengurus Barang Pembantu UPTD Puskesmas Tomia)	9	Kondisi Kerja	450.000
25	JF Apoteker Ahli Pertama (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Usuku Tomia Timur)	8	Kondisi Kerja	450.000
26	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama (Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Usuku Tomia Timur)	8	Kondisi Kerja	450.000
27	JF Sanitarian Ahli Madya (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Usuku Tomia Timur)	11	Kondisi Kerja	450.000
28	JF Perawat Terampil (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	6	Kondisi Kerja	450.000
29	JF Asisten Apoteker Terampil (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Binongko)	6	Kondisi Kerja	450.000
30	JF Perawat Penyelia (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Binongko)	8	Kondisi Kerja	450.000
31	JF Perawat Ahli Muda (Pengurus Barang Pembantu)	8	Kondisi Kerja	450.000
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	12	Beban Kerja	3.231.000
2	Kepala Bagian Tata Usaha	11	Beban Kerja	929.000
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan	9	Beban Kerja	820.000

5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	1.150.000
7	Dokter Ahli Madya	12	Beban Kerja	1.500.000
8	Dokter Ahli Muda	10	Beban Kerja	1.500.000
9	Dokter Ahli Pertama	9	Beban Kerja	1.500.000
10	JF Radiografer Penyelia	8	Kondisi Kerja	589.000
11	JF Perawat Mahir (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Muda (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	9	Kondisi Kerja	511.000
13	JF Asisten Apoteker Penyelia (Pembantu Pengurus Barang)	8	Kondisi Kerja	258.000
14	Apoteker Ahli Madya (Pembantu Pengurus Barang)	11	Kondisi Kerja	258.000
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Bina Marga (PPTK Bidang/Tim Teknis)	11	Kondisi Kerja	750.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (PPTK Sekretariat dan Tim Teknis/Direksi)	9	Beban Kerja	1.319.000
5	Kepala Sub Bagian Program, keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	879.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Penerima/Tim Teknis/Direksi)	7	Kondisi Kerja	750.000

7	Penelaah Teknis Kebijakan (Tim Teknis/Direksi)	7	Kondisi Kerja	750.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Tim Teknis/Direksi/Pembantu bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	750.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	1.150.000
10	Penata Layanan Operasional (Tim Teknis/ Direksi)	7	Kondisi Kerja	750.000
11	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Tim Teknis/ Direksi)	7	Kondisi Kerja	750.000
12	Operator Layanan Operasional (Tim Teknis/Direksi Teknis/Staf Pengelola Proyek)	5	Kondisi Kerja	750.000
13	Petugas Operasi dan Pemeliharaan (Tim Teknis/Direksi Teknis/Staf Pengelola Proyek)	5	Kondisi Kerja	750.000
14	JF Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Pertama (Tim Teknis/Direksi)	8	Kondisi Kerja	750.000
15	JF Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi)	9	Kondisi Kerja	750.000
16	JF Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi)	9	Kondisi Kerja	750.000
17	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama (Tim Teknis/Direksi)	8	Kondisi Kerja	750.000
18	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi)	9	Kondisi Kerja	750.000
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14	Beban Kerja	3.700.000

2	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
5	Pengolah Data dan Informasi (Pengurus Barang Pengguna)	6	Kondisi Kerja	952.000
9	DINAS SOSIAL			
1	Kepala Dinas Sosial	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Dinas Sosial	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	952.000
5	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (PPTK)	11	Kondisi Kerja	929.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
6	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	820.000
7	Kepala Seksi Pemadam dan Evakuasi	9	Kondisi Kerja	732.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Petugas Pemadam Kebakaran)	7	Kondisi Kerja	519.000

9	JF Polisi Pamong Praja Mahir (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
10	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	6	Kondisi Kerja	511.000
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	820.000
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PPK)	11	Kondisi Kerja	1.000.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	8	Beban Kerja	820.000
5	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	Beban Kerja	1.202.000

3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
5	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
6	JF Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
5	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Pengurus Barang Pengguna)	9	Kondisi Kerja	752.000
15	DINAS KETAHANAN PANGAN			
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (PPK)	7	Kondisi Kerja	1.000.000
7	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000

16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas	11	Beban Kerja	503.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pejabat Penatausahaan Barang)	9	Beban Kerja	820.000
5	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (Pejabat Penatausahaan Keuangan)	9	Beban Kerja	820.000
6	Penata Layanan Operasional (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	952.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	11	Beban Kerja	929.000
4	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	Beban Kerja	929.000
5	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	Beban Kerja	929.000
6	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (PPTK)	11	Beban Kerja	929.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000

8	Penelaah Teknis Kebijakan (PPK SKPD)	7	Beban Kerja	498.000
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Administrator Pengelola SIAK)	7	Beban Kerja	498.000
10	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Administrator Pengelola SIAK)	7	Beban Kerja	498.000
11	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Pengeluaran)	7	Beban Kerja	498.000
12	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Beban Kerja	498.000
13	Pengadministrasi Perkantoran	5	Beban Kerja	361.000
14	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Beban Kerja	498.000
15	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	952.000
16	Pengolah Data dan Informasi	6	Beban Kerja	433.000
17	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	Beban Kerja	703.000
18	JF Administator Database Kependudukan Ahli Muda	9	Beban Kerja	703.000
19	JF Administator Database Kependudukan Ahli Muda	9	Beban Kerja	703.000
20	JF Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	8	Beban Kerja	565.000
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000

3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Pengurus Barang)	7	Kondisi Kerja	511.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
7	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
19	DINAS PERHUBUNGAN			
1	Kepala Dinas Perhubungan	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Perhubungan (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Prasarana (PPTK/PPK)	11	Kondisi Kerja	1.000.000
4	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	1.150.000
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (PA)	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000

21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA			
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD)	9	Beban Kerja	820.000
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
5	Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA			
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (PPK/PA)	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000

3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
4	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	752.000
5	Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	820.000
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	Beban Kerja	1.202.000
3	JF Pustakawan Terampil (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	11	Kondisi Kerja	511.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
6	Pengolah Data dan Informasi (Pengurus Barang Pengguna)	6	Kondisi Kerja	752.000
7	Arsiparis Ahli Muda (Pejabat Penatausahaan Barang)	9	Kondisi Kerja	511.000
25	DINAS PERIKANAN			
1	Kepala Dinas Perikanan	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Perikanan	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	7	Kondisi Kerja	511.000
5	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	952.000
6	JF Pengawas Perikanan (Perencana/Program)	8	Kondisi Kerja	820.000

7	Analisis Aquakultur Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi)	9	Kondisi Kerja	400.000
8	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi Teknis)	10	Kondisi Kerja	400.000
26	DINAS PERTANIAN			
1	Kepala Dinas Pertanian	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Pertanian	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	952.000
5	JF Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD)	10	Beban Kerja	820.000
6	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda (Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna/Direksi Teknis)	9	Kondisi Kerja	400.000
7	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi)	9	Kondisi Kerja	400.000
8	Penelaah Teknis Kebijakan (Tim Teknis/Direksi Teknis)	7	Kondisi Kerja	400.000
27	DINAS PARIWISATA			
1	Kepala Dinas Pariwisata	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Pariwisata (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Pengemb. Destinasi dan Industri Pariwisata (Tim Teknis)	11	Kondisi Kerja	400.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000

5	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Tim Teknis)	7	Kondisi Kerja	400.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna/Tim Teknis)	7	Kondisi Kerja	1.150.000
8	Pengadministrasi Perkantoran (Pembantu Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	511.000
9	JF Perencana Ahli Muda (Tim Teknis)	10	Kondisi Kerja	1.220.000
10	JF Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda (Tim Teknis)	10	Kondisi Kerja	400.000
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PPTK)	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
5	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	952.000
29	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	Beban Kerja	5.097.000
2	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Perencanaan Makro	11	Beban Kerja	503.000

4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan (PPK)	7	Kondisi Kerja	1.000.000
8	JF Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
1	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	14	Beban Kerja	5.097.000
2	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Anggaran	11	Beban Kerja	1.936.000
4	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	Beban Kerja	2.091.000
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11	Beban Kerja	1.394.000
6	Kepala Bidang Aset	11	Beban Kerja	1.394.000
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
8	Kepala Sub Bidang Anggaran I	9	Beban Kerja	732.000
9	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	9	Beban Kerja	732.000
10	Kepala Sub Bidang Pengeluaran	9	Beban Kerja	732.000
11	Kepala Sub Bidang Akuntansi	9	Beban Kerja	732.000
12	Kepala Sub Bidang Anggaran II	8	Beban Kerja	589.000
13	Kepala Sub Bidang Pelaporan	8	Beban Kerja	589.000
14	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Aset	8	Beban Kerja	589.000

15	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	8	Beban Kerja	589.000
16	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	952.000
17	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Beban Kerja	732.000
18	JF Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA			
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Beban Kerja	3.700.000
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	Beban Kerja	1.202.000
3	Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi	11	Beban Kerja	503.000
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	11	Beban Kerja	503.000
5	Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi	11	Beban Kerja	503.000
6	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	11	Beban Kerja	503.000
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
9	Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	7	Kondisi Kerja	511.000
10	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
11	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
12	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000

32	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	Beban Kerja	3.560.000
2	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	Beban Kerja	1.202.500
3	Kepala Bidang Pendapatan I (Admin Simda)	11	Beban Kerja	350.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
5	Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah (Admin Pusedalitbang Bapenda)	9	Kondisi Kerja	350.000
6	Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB (Admin PBB/SISMIOP)	9	Beban Kerja	350.000
7	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	752.000
8	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Admin-BPHTB)	7	Beban Kerja	350.000
9	JF Perencana Ahli Muda	10	Beban Kerja	820.000
33	KECAMATAN			
33.1	KECAMATAN WANGI-WANGI			
1	Camat Wangi-Wangi	13	Beban Kerja	2.920.000
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	820.000
4	Pengolah Data dan Informasi (Pengurus Barang Pengguna)	6	Kondisi Kerja	752.000
5	Lurah Pongo	9	Beban Kerja	500.000
6	Sekretaris Kelurahan Pongo	8	Beban Kerja	350.000
7	Lurah Wanci	9	Beban Kerja	500.000

8	Sekretaris Kelurahan Wanci	8	Beban Kerja	350.000
9	Lurah Wandoka Selatan	9	Beban Kerja	500.000
10	Sekretaris Lurah Wandoka Selatan	8	Beban Kerja	350.000
11	Lurah Wandoka	9	Beban Kerja	500.000
12	Sekretaris Lurah Wandoka	8	Beban Kerja	350.000
13	Lurah Wandoka Utara	9	Beban Kerja	500.000
14	Sekretaris Kelurahan Wandoka Utara0	8	Beban Kerja	350.000
15	Lurah Waetuno	9	Beban Kerja	500.000
16	Sekretaris Kelurahan Waetuno	8	Beban Kerja	350.000
33.2 KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN				
1	Camat Wangi-Wangi Selatan	13	Beban Kerja	2.920.000
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	820.000
3	Kepala Sub Program, Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	820.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
5	Lurah Mandati I	9	Beban Kerja	500.000
6	Sekretaris Kelurahan Mandati I	8	Beban Kerja	350.000
7	Lurah Mandati II	9	Beban Kerja	500.000
8	Sekretaris Kelurahan Mandati II	8	Beban Kerja	350.000
9	Lurah Mandati III	9	Beban Kerja	500.000
10	Sekretaris Kelurahan Mandati III	8	Beban Kerja	350.000
33.3 KECAMATAN KALEDUPA				
1	Camat Kaledupa	13	Beban Kerja	2.920.000
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000

3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
4	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	752.000
5	Lurah Ambeua	9	Beban Kerja	500.000
6	Sekretaris Kelurahan	8	Beban Kerja	350.000
7	Lurah Lagiwae	9	Beban Kerja	500.000
8	Sekretaris Kelurahan	8	Beban Kerja	350.000
9	Lurah Laulua	9	Beban Kerja	500.000
10	Sekretaris Kelurahan	8	Beban Kerja	350.000
11	Lurah Buranga	9	Beban Kerja	500.000
12	Sekretaris Kelurahan	9	Beban Kerja	350.000
33.4 KECAMATAN KALEDUPA SELATAN				
1	Camat Kaledupa Selatan	13	Beban Kerja	2.920.000
2	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	820.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna)	7	Kondisi Kerja	752.000
33.5 KECAMATAN TOMIA				
1	Camat Tomia	13	Beban Kerja	2.920.000
2	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	820.000
3	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	752.000
4	Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada seksi Pembangunan (Penatausahaan Barang)	7	Kondisi Kerja	511.000
5	Lurah Waha	9	Beban Kerja	500.000
6	Sekretaris Kelurahan Waha	8	Beban Kerja	350.000

7	Lurah Onemay	9	Beban Kerja	500.000
8	Sekretaris Kelurahan Onemay	8	Beban Kerja	350.000
33.6 KECAMATAN TOMIA TIMUR				
1	Camat Tomia Timur	13	Beban Kerja	2.920.000
2	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Pengurus Barang Pengguna)	8	Kondisi Kerja	752.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
4	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	820.000
5	Lurah Bahari	9	Beban Kerja	500.000
6	Sekretaris Kelurahan Bahari	8	Beban Kerja	350.000
7	Lurah Patipelong	9	Beban Kerja	500.000
8	Sekretaris Kelurahan Patipelong	8	Beban Kerja	350.000
9	Lurah Tongano Barat	9	Beban Kerja	500.000
10	Sekretaris Kelurahan Tongano Barat	8	Beban Kerja	350.000
11	Lurah Tongano Timur	9	Beban Kerja	500.000
12	Sekretaris Kelurahan Tongano Timur	8	Beban Kerja	350.000
33.7 KECAMATAN BINONGKO				
1	Camat Binongko	13	Beban Kerja	2.920.000
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
3	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	8	Beban Kerja	820.000
4	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	752.000
5	Lurah Palahidu	9	Beban Kerja	500.000
6	Sekretaris Kelurahan Palahidu	8	Beban Kerja	350.000

7	Lurah Rukuwa	9	Beban Kerja	500.000
8	Sekretaris Kelurahan Rukuwa	8	Beban Kerja	350.000
9	Lurah Taipabu	9	Beban Kerja	500.000
10	Sekretaris Kelurahan Taipabu	8	Beban Kerja	350.000
11	Lurah Wali	9	Beban Kerja	500.000
12	Sekretaris Kelurahan Wali	8	Beban Kerja	350.000
33.8 KECAMATAN TOGO BINONGKO				
1	Camat Togo Binongko	13	Beban Kerja	2.920.000
2	Kepala Sub Program, Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	820.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	820.000
4	Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna)	5	Kondisi Kerja	752.000
5	Lurah Popalia	9	Beban Kerja	500.000
6	Sekretaris Kelurahan Popalia	8	Beban Kerja	350.000
7	Lurah Kelurahan Sowa	9	Beban Kerja	500.000
8	Sekretaris Kelurahan Sowa	8	Beban Kerja	350.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda,
Sya Anis, S.H.,MH.Kes
1015 199803 2 008



BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 WAKATOBI

A. FORMAT PENILAIAN KINERJA AKTIVITAS DAN KINERJA KEHADIRAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN WAKATOBI

Periode Penilaian : Bulan Tahun
 Perangkat Daerah :

No	Pejabat Penilai			PNS/CPNS Yang Dinilai	
1	Nama			Nama	
2	NIP			NIP	
3	Pangkat, Gol. Ruang			Pangkat, Gol. Ruang	
4	Jabatan			Jabatan	
5	Unit Kerja			Unit Kerja	
NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	Skor	HASIL PENGUKURAN
1	CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI	Kinerja 1	Nilai \geq 95%	100%	Standar TPP x 60% x (K1/K2/ K3/K4/K5/K6/ K7/K8/K9/K10/K11 /K12/K13/ K14/K15/K16/ K17/K18/K19/ K20/K21)
		Kinerja 2	Nilai 90-94%	95%	
		Kinerja 3	Nilai 85-89%	90%	
		Kinerja 4	Nilai 80-84%	85%	
		Kinerja 5	Nilai 75-79%	80%	
		Kinerja 6	Nilai 70-74%	75%	
		Kinerja 7	Nilai 65-69%	70%	
		Kinerja 8	Nilai 60-64%	65%	
		Kinerja 9	Nilai 55-59%	60%	
		Kinerja 10	Nilai 50-54%	55%	
		Kinerja 11	Nilai 45-49%	50%	
		Kinerja 12	Nilai 40-44%	45%	
		Kinerja 13	Nilai 35-39%	40%	
		Kinerja 14	Nilai 30-34%	35%	
		Kinerja 15	Nilai 25-29%	30%	
		Kinerja 16	Nilai 20-24%	25%	
		Kinerja 17	Nilai 15-19%	20%	
		Kinerja 18	Nilai 10-14%	15%	
		Kinerja 19	Nilai 5-9%	10%	
		Kinerja 20	Nilai 1-4%	5%	
		Kinerja 21	Nilai 0	0%	

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	Skor	HASIL PENGUKURAN
2	KEHADIRAN KERJA	Skor 1	Terlambat 1 samapi 30 menit	$100 - (0,50 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$	Standar TPP x 40% x 100 - {1.100 - (Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 10 + Skor 11)}
		Skor 2	Terlambat 31 samapi 60 menit	$100 - (1,00 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$	
		Skor 3	Terlambat 61 samapi 90 Menit	$100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$	
		Skor 4	Terlambat lebih dari 91 menit	$100 - (1,50 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$	
		Skor 5	Pulang kerja sebelum waktunya 1 samapi 30 menit	$100 - (0,50 \times \text{hari pulang kerja sebelum waktunya})$	
		Skor 6	Pulang kerja sebelum waktunya 31 samapi 60 menit	$100 - (1,00 \times \text{hari pulang kerja sebelum waktunya})$	
		Skor 7	Pulang kerja sebelum waktunya 61 samapi 90 menit	$100 - (1,25 \times \text{hari pulang kerja sebelum waktunya})$	
		Skor 8	Pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 91 menit	$100 - (1,50 \times \text{hari pulang kerja sebelum waktunya})$	
		Skor 9	Tidak hadir mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah	$100 - (1,00 \times \text{jumlah hari tidak mengikuti apel masuk kerja})$	
		Skor 10	Tidak hadir mengikuti apel pulang kerja tanpa keterangan yang sah	$100 - (1,00 \times \text{jumlah hari tidak mengikuti apel pulang kerja})$	
		Skor 11	Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah	$100 - (3 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan : Tahun	Jumlah TPP = Standar TPP x (% Capaian Kinerja Aktifitas + % Capaian Kinerja Kehadiran) x % Hukuman Disiplin
Rp.....	$\text{Jumlah TPP} = \text{Standar TPP} \times \left(\frac{60}{100} \times (K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8) \right) + \text{Standar TPP} \times \left(\frac{40}{100} \times (100 - ((1.100 - (\text{Skor1} + \text{Skor2} + \text{Skor3} + \text{Skor4} + \text{Skor5} + \text{Skor6} + \text{Skor7} + \text{Skor8} + \text{Skor9} + \text{Skor10} + \text{Skor11)))) \right)$ Jumlah TPP = Rp.
Tanda tangan pejabat yang menilai: (.....) NIP.	Tanda tangan pejabat/ pegawai yang dinilai: (.....) NIP.

B. FORMAT PENGUKURAN KINERJA AKTIVITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

PENGUKURAN KINERJA AKTIVITAS BULANAN

NAMA :
 NIP :
 PANGKAT :
 JABATAN :
 INSTANSI :
 PERIODE PENILAIAN:

RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESUAI EKSPEKTASI		REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG			PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN KINERJA	
			KUANTITAS	KUALITAS	CAPAIAN DATA DUKUNG	KUANTITAS	KUALITAS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. UTAMA										
1.		1.								
		2.								
		3.								
		dst.								
B. TAMBAHAN										
Nilai Capaian Kinerja										

....., 20....

Pejabat Penilai Kinerja,

(.....)

C. FORMAT URAIAN AKTIVITAS DAN OUTPUT BULANAN

LAPORAN AKTIVITAS BULANAN

NAMA :
NIP. :
PANGKAT/GOL. :
JABATAN :
UNIT KERJA :

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	KET
1	2	3	4
MINGGU I (tanggal ... s.d. tanggal ...)			
1			
2			
Dst...			
MINGGU II (tanggal ... s.d. tanggal ...)			
1			
2			
Dst...			
MINGGU III (tanggal ... s.d. tanggal ...)			
1			
2			
Dst...			
MINGGU IV (tanggal ... s.d. tanggal ...)			
1			
2			
Dst...			
MINGGU V (tanggal ... s.d. tanggal ...)			
1			
2			
Dst...			



BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

B. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI KABUPATEN WAKATOBI

Bulan :..... Tahun

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP (Rp)					Total Nominal Pagu TPP (Rp)	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
					TPP Beban Kerja			TPP Kondisi Kerja	TPP Kelangkaan Profesi		Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1% (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
					Pemenuhan Basic TPP	Tambahan Karena Beban Kerja	Jumlah															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8=(6+7)	(9)	(10)	11=(9+10)	(12)	(13)	(14)	(15)	16=(14+15)	(17)	18=(16+17)	(19)	(20)	(21)	22=(19+20+21)	23=(18-22)
1																						
2																						
JUMLAH TOTAL																						

Mengetahui:
Kepala,

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pegguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

.....,,
Pembuat Daftar,

.....
NIP.

C. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS

Bulan :..... Tahun

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP (Rp)					Total Nominal Pagu TPP (Rp)	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
					TPP Beban Kerja			TPP Kondisi Kerja	TPP Tempat Bertugas		Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1% (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
					Pemenuhan Basic TPP	Tambahan Karena Beban Kerja	Jumlah															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(6+7)	(9)	(10)	11=(8+9+10)	(12)	(13)	(14)	(15)	16=(14+15)	(17)	18=(16+17)	(19)	(20)	(21)	22=(19+20+21)	23=(18-22)
1																						
2																						
JUMLAH TOTAL																						

Mengetahui:
Kepala

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol...
NIP.

.....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

D. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA

Bulan : Tahun

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP (Rp)				Total Nominal Pagu TPP (Rp)	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
					TPP Beban Kerja			TPP Kondisi Kerja		Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1% (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
					Pemenuhan Basic TPP	Tambahan Karena Beban Kerja	Jumlah														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(6+7)	(9)	10=(8+9)	(11)	(12)	(13)	(14)	15=(13+14)	(16)	17=(15+16)	(18)	(19)	(20)	21=(18+19+20)	22=(17-21)
1																					
2																					
JUMLAH TOTAL																					

Mengetahui:
Kepala

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

.....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

E. FORMAT PERMINTAAN TPP BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KABUPATEN WAKATOBI
Bulan : Tahun

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP Beban Kerja			Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
					Pemenuhan Basic TPP	Tambahan Karena Beban Kerja	Jumlah	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1% (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13=(11+12)	(14)	15=(13+14)	(16)	(17)	(18)	19=(16+17+18)	20=(15-19)
1																			
2																			
JUMLAH TOTAL																			

Mengetahui:
Kepala

.....
NIP.

.....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Peguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol ...
NIP.

G. FORMAT PERMINTAAN TPP TEMPAT BERTUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KABUPATEN WAKATOBI

Bulan : Tahun

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP Tempat Bertugas	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
						Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS % (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	$11=(9+10)$	(12)	$13=(11+12)$	(14)	(15)	(16)	$17=(14+15+16)$	$18=(13-17)$
1																	
2																	
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahui:

Kepala,

.....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
NIP.

.....
Pangkat/Gol ...
NIP.

H. FORMAT PERMINTAAN TPP KELANGKAAN PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KABUPATEN WAKATOBI

Bulan : Tahun

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Nominal Pagu TPP Kelangkaan Profesi	Presentase Capaian Kinerja (%)		Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
						Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1% (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=(9+10)	(12)	13=(11+12)	(14)	(15)	(16)	17=(14+15+16)	18=(13-17)
1																	
2																	
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahui:
Kepala,

.....,

Pembuat Daftar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran
(Kepala Perangkat Daerah)

.....
Pangkat/Gol ...
NIP.

I. FORMAT REKAPITULASI PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 KABUPATEN WAKATOBI
 Bulan : Tahun

No.	Uraian/Jenis TPP	Nominal Pagu TPP (Rp)	Besaran TPP (Rp)			BPJS 4% (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan			Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
			Kinerja Aktivitas	Kinerja Kehadiran	Jumlah (Rp)			Potongan PPh 21 (Rp)	BPJS 1% (Rp)	BPJS 4% (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4+5)	(7)	8=(6+7)	(9)	(10)	(11)	12=(9+10+11)	13=(8-12)
1												
2												
3												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui:
 Kepala

.....
 NIP.

Mengetahui/Menyetujui:
 Pengguna Anggaran
 (Kepala Perangkat Daerah)

.....
 Pangkat/Gol.....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Bagian Hukum Setda,
 H. Anis, S.H.,MH.Kes
 31015 199803 2 008



.....,

Pembuat Daftar,

.....
 NIP.

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN WAKATOBI

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERMINTAAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun selaku pejabat yang bertanggungjawab mengesahkan Daftar Perhitungan Uang TPP untuk bulan tahun

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa Daftar Perhitungan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan adalah benar adanya, sesuai dengan realisasi penghitungan prestasi kerja proses dan output kegiatan sesuai kontrak kinerja dan prestasi kinerja kehadiran kerja berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 202... tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 202....

Jika terjadi kesalahan dalam daftar dan perhitungannya, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul akibat terjadinya kesalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangi-Wangi, 202....
 Kepala Perangkat Daerah
 Selaku Pejabat Penanggungjawab,

Materai
 Rp 10.000,-

Ttd/Stempel

(Nama).....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pdt. Kepala Bagian Hukum Setda,
 Haliana Anis, S.H.,MH.Kes
 61015 199803 2 008



BUPATI WAKATOBI,
 ttd/cap
 HALIANA